

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS ABDUL KHOIR)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
WINI KUSUMAWARDHANI  
NIM. E0013411**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS ABDUL KHOIR)**

**Oleh:**

**WINI KUSUMAWARDHANI**

**NIM. E0013411**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 18 Oktober 2017**

**Dosen Pembimbing**

**Subekti, S.H., M.H.**

**NIP. 196410221989032002**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS ABDUL KHOIR)**

**Oleh:**

**WINI KUSUMAWARDHANI**

**NIM. E0013411**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 November 2017

**DEWAN PENGUJI**

1. Ismunarno, S.H., M.Hum.  
NIP. 196604281990031001 : .....  
Ketua
2. Lushiana Primasari, S.H., M.H.  
NIP. 198507182009122005 : .....  
Sekretaris
3. Subekti, S.H., M.H.  
NIP. 196410221989032002 : .....  
Anggota

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum**

**NIP. 196011071986011001**

## PERNYATAAN

Nama : Wini Kusumawardhani  
NIM : E0013411

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS ABDUL KHOIR)**  
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 18 Oktober 2017  
Yang membuat pernyataan,

Wini Kusumawardhani  
NIM. E0013411

## **MOTTO**

Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula.

(Martin Luther King)

Just because you took longer than others, doesn't mean you failed.

(Daniel Friday Danzor)

Akhir yang indah akan menghampirimu jika kamu selalu melakukan yang terbaik dan percaya bahwa usaha dan doa tidak akan mengkhianati proses.

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku Bapak Dwi Yulianto, S.H. dan Ibu Rusnaeni Suwarni yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa untuk keberhasilan penulis.

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

## ABSTRAK

**Wini Kusumawardhani. 2017. E0013411. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Abdul Khoir). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum empiris bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Abdul Khoir sebagai salah satu pelaku tindak pidana korupsi proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan dalam Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JktPst, hakim tidak mempertimbangkan peran Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator*, sehingga menyebabkan Abdul Khoir dijatuhi pidana oleh hakim melebihi tuntutan jaksa penuntut umum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu (1) mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penetapan *Justice Collaborator*, (2) perlindungan fisik dan psikis, (3) penanganan khusus dan (4) penghargaan. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi yaitu (1) perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum, (2) kekeliruan hakim, (3) Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat mengikat hakim dan (4) Komisi Pemberantasan Korupsi belum memiliki peraturan internal yang mengatur tentang *Justice Collaborator*.

**Kata Kunci:** *Justice Collaborator*, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

## **ABSTRACT**

**Wini Kusumawardhani. 2017. E0013411. Legal Protection Against Justice Collaborator In Corruption (Case Study Abdul Khoir). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.**

*This study aims to determine the form of protection against Abdul Khoir as Justice Collaborator in corruption and obstacles in the implementation of the protection of Abdul Khoir as Justice Collaborator in corruption. The writing of this law is the writing of empirical law is descriptive. The research approach uses qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Techniques of collecting legal materials used are through interviews, observation, and literature study. Analysis of legal materials using qualitative methods.*

*Based on the results of the research, Abdul Khoir as one of the corruption actors of infrastructure projects in Maluku and North Maluku that are designated as Justice Collaborator by the Corruption Eradication Commission do not get maximum legal protection. That is because in Decision No. 32 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.JktPst, the judge did not consider the role of Abdul Khoir as Justice Collaborator, causing Abdul Khoir sentenced by the judge exceeds the demands of the public prosecutor.*

*The form of legal protection against Abdul Khoir as Justice Collaborator in the corruption provided by the Corruption Eradication Commission (1) issued a Decree of the Chairman of the Corruption Eradication Commission on the establishment of Justice Collaborator; (2) physical and psychological protection; (3) special treatment and (4) appreciation. Constraints in the implementation of legal protection against Abdul Khoir as Justice Collaborator in corruption crime are (1) difference of perception between law enforcement officer, (2) mistake of judge, (3) Decision of Leader of Corruption Eradication Commission can bind judges and (4) The Corruption Eradication Commission does not yet have internal regulations governing the Justice Collaborator.*

**Keywords: Justice Collaborator, Legal protection, Corruption**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Abdul Khoir)”**. Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum (skripsi) ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya.

Penulis meyakini bahwa dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini menemui berbagai rintangan, tantangan dan hambatan yang harus dilewati dan tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Sapto Hermawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta nasehat kepada penulis;
3. Subekti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku Pembimbing dalam penulisan hukum (skripsi) ini yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu nya selama penulis menempuh masa studi;
5. Kedua orang tuaku Bapak Dwi Yulianto, S.H., dan Ibu Rusnaeni Suwarni yang selalu memberikan semangat, dukungan, cinta dan kasih sayang, harapan serta doa yang tidak ada hentinya kepada penulis;

6. Adik-adikku Aryo Pandu Winanto dan Evan Danar Winanto yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis;
7. Pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban beserta jajarannya, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penulisan hukum (skripsi) ini dan kepada Bapak Raja Baringin, selaku Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memberikan informasi dan motivasi kepada penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini;
8. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penulisan hukum (skripsi) ini dan kepada Bapak R. Natalia Kristanto, selaku Fungsional Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memberikan informasi dan motivasi kepada penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini;
9. Sahabat penulis Arasy Azzahra, Nurhanifah Fajriyyah, Dhea Swasti, Alisyah Fahrani, Yolanda Mustika, Alfiani, Bella Oktaviani, GP Mahara, Dwi Listianti, Dea Annisa, Riezdiani Restu dan Rizka Cahaya, yang selalu memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
10. Ario Purwo Dyatmiko beserta keluarga, yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis;
11. Teman-teman satu pembimbing Anisa, Adit, Poldung dan Hadi yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
12. Teman-teman CFC yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
13. Teman-teman MPK yang turut memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2013 yang turut mendukung dan bersama-sama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih memiliki banyak kekurangan, maka diperlukan saran dan kritik dalam penyempurnaan penulisan hukum (skripsi) ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum (skripsi) ini berguna dan bermanfaat bagi penulis, pembaca dan penegakan hukum di kemudian hari.

Surakarta, 18 Oktober 2017

Penulis

Wini Kusumawardhani

E0013411

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teori .....	13
1. Tindak Pidana Korupsi sebagai <i>Extra Ordinary Crime</i> ...	13

2. Perlindungan Hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> .....	25
B. Kerangka Pemikiran .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian .....	45
1. Penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .....	45
a. Jenis Permohonan Perlindungan yang Dimohonkan ke LPSK .....	49
b. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban .....	51
c. Kerjasama LPSK dengan Berbagai Lembaga .....	52
2. Penelitian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	54
3. Kasus Posisi .....	63
B. Pembahasan .....	65
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Abdul Khoir sebagai <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi .....	65
2. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Abdul Khoir sebagai <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi .....	76
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>96</b>
A. Simpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Analisis Interaktif .....	11
Gambar 2. Permohonan Perlindungan LPSK .....	47
Gambar 3. Jenis Kasus yang Diregister LPSK Tahun 2016 .....	48
Gambar 4. Permohonan Diregister Berdasarkan Status Pemohon Tahun 2016 .....	48
Gambar 5. Jumlah Layanan Pemenuhan Hak Prosedural dan Layanan Perlindungan Fisik Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Tahun 2016 .....	52

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran .....	43
Bagan 2. Struktur Organisasi LPSK .....	46
Bagan 3. Struktur Organisasi KPK .....	55
Bagan 4. Mekanisme Penetapan dan Pemberian Perlindungan terhadap <i>Justice Collaborator</i> oleh KPK .....	62
Bagan 5. Divisi Perlindungan Bagi Saksi Pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) di Tingkat Nasional .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan unsur dan ancaman pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor .....	14
Tabel 2. Jenis tindak pidana korupsi terkait dengan suap menyuap .....	16
Tabel 3. Perbedaan <i>Justice Collaborator</i> dan <i>Whistleblower</i> .....	26
Tabel 4. Jenis Permohonan Perlindungan ke LPSK Tahun 2016 .....	49
Tabel 5. Data Layanan Pemenuhan Saksi dan Korban Tahun 2016 .....	51
Tabel 6. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2016 .....	56
Tabel 7. Pasal yang terkait dengan <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .....	59



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Lampiran 2. Berita Acara Wawancara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Lampiran 4. Lembar Tanda Terima Permohonan Izin Penelitian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Lampiran 5. Berita Acara Wawancara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)